

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Affandy, Muh Ruslan, *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013)
- G. Kertasapoetra dan R.G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, 1985)
- Hamidi, *Masyarakat Terasing daerah Riau di Gerbang Abad 21*, (Pekanbaru: UIR, 1991)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999)
- Hazirin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Tintamas, 1970)
- Koesnoe, Moh, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Pekanbaru: UIR Press, 1994)
- Mulyadi, Lilik, *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017)
- Rato, Dominikus, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang PressIndo, 2011)
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2012)
- Sumardjono, Maria.S.W, *KebijakanPertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1996)
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983)
- Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)

Soetikno, Iman, *Politik Hukum Agraria Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994)

Thalib, Hambali, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Universitas Pattimura, 2009)

Theo, Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: kanisius, 1982)

Warman, Kurnia, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV, 2012)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.10 Tahun 2016

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan
pengrusakan hutan (P3H)

Jurnal

Pakis, Emrizal, 1996, *Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis Tahun 1996, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bekerjasama Dengan Kantor Statistik Kabupaten Bengkalis*

Abu Bakar dan Abd Ghofur, 2017, *Problematisa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis*

Effendi, Erdianto, 2017, *Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan Di Kabupaten Bengkalis*

Dasrol, Ramlan Darmansyah dkk, 2021, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat*

Syarifuddin, 2019, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*

Isdarwanto, Totok, 2010, *Suku Sakai Dalam Tiga Kekuasaan Di Riau*

Trio Saputra, Aguswan dkk, 2021, *Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*

Ismi, Hayatul, 2020, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*

Gusliana, 2010, *Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Di Provinsi Riau*

Arrasid, Sandi, 2021, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria*

Internet

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/20/bongku-dan-pengabaian-hak-masyarakat-adat>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 16:30.